

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah yang akan selalu muncul, baik di negara maju maupun negara berkembang. Seseorang dikatakan miskin apabila ia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal (Todaro & Smith, 2011). Kemiskinan dapat dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya ialah lesunya kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan. Jika masalah kemiskinan tidak dapat diselesaikan, kesejahteraan masyarakat tidak akan terwujud.

Salah satu upaya untuk mengetaskan kemiskinan ialah dengan melakukan pembangunan. Pembangunan merupakan serangkaian proses sosial dan ekonomi yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Todaro & Smith, 2011). Sementara itu, menurut Utomo (2001) pembangunan merupakan proses perubahan yang tidak akan pernah berhenti karena pembangunan pada dasarnya suatu konsep normatif yang menyiratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai realisasi potensi manusia. Idealnya, pembangunan dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan prioritas kebutuhan masing-masing daerah. Salah satu tujuan pembangunan ialah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, salah satu indikator keberhasilan pembangunan ialah laju penurunan jumlah penduduk miskin.

Tabel 1-1 menunjukkan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2019 cenderung menurun, meskipun pada tahun 2010-2011 sempat mengalami kenaikan. Akan tetapi, jumlah penduduk miskin pada tahun 2013-2017 cenderung mengalami fluktuasi. Meski cenderung menurun, bisa dikatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah masih terbilang banyak. Hal tersebut membuktikan bahwa pendapatan yang diperoleh masyarakat belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1-1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2019

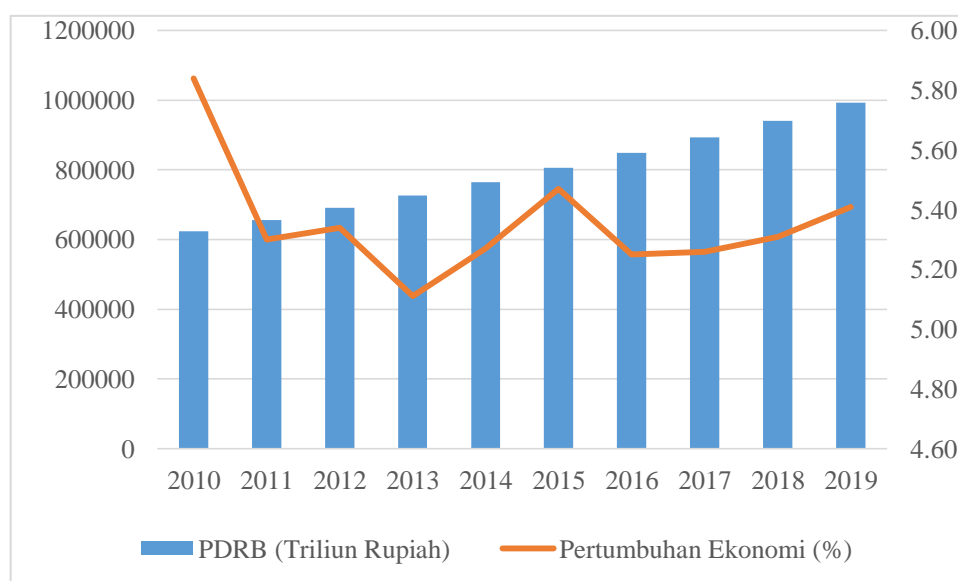
Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	
	(Ribu Jiwa)	(%)
2010	5217,20	16,11
2011	5256,00	16,21
2012	4952,06	14,98
2013	4481,34	14,44
2014	4561,83	13,58
2015	4457,04	13,58
2016	4506,89	13,27
2017	4450,71	13,01
2018	3897,20	11,32
2019	3743,23	10,80

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, data diolah

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan ialah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran yang menunjukkan adanya perkembangan dan peningkatan perekonomian dalam suatu wilayah dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Meier, 1989 dalam Dinarjito &

Dharmazi, 2020). Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah biasanya diukur menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang juga sering dianggap sebagai pendapatan daerah. Pendapatan yang tinggi dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, PDRB mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kemiskinan. Semakin tinggi PDRB, semakin tinggi pula pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Grafik 1-1
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 dan Pertumbuhan Ekonomi di
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2019



Sumber: BPS Jawa Tengah, data diolah

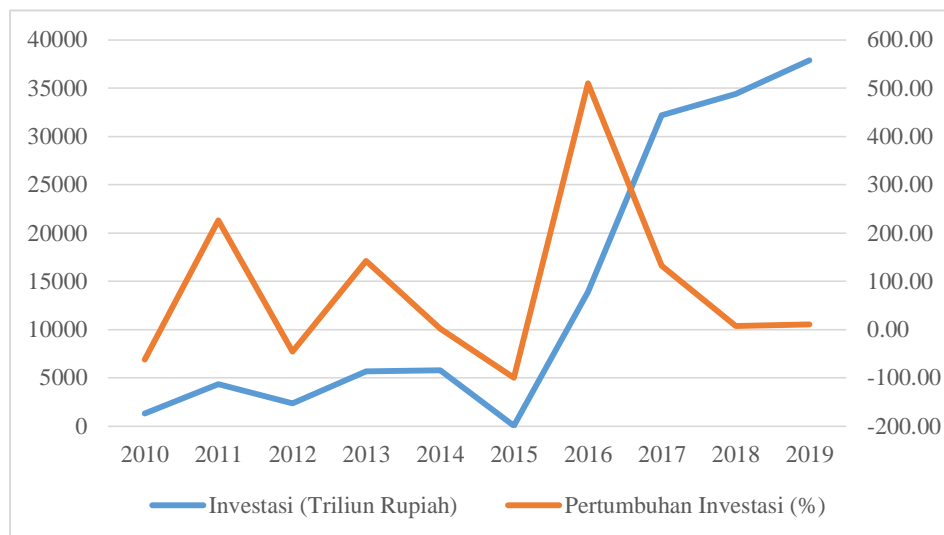
Berdasarkan Grafik 1-1, terlihat bahwa PDRB di Provinsi Jawa Tengah selalu meningkat setiap tahunnya. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 hingga 2019 cenderung fluktuatif. Hal tersebut disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal di antaranya adalah infrastruktur, perizinan, dan politik yang mengakibatkan belum optimalnya kinerja sektor industri

pengolahan. Sementara itu, faktor eksternal meliputi teknologi, diharapkan dengan adanya teknologi yang memadai dapat meningkatkan kualitas produksi pertanian.

Selain itu, perkembangan gejolak ekonomi global dan terbukanya pasar bebas Asia Pasifik mengakibatkan tingginya persaingan antarproduk. Hal ini berdampak pada menurunnya permintaan pasar global dan nilai ekspor serta melambatnya laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah (RPJMD Jawa Tengah, 2014). Pertumbuhan ekonomi yang menurun menandakan penurunan tambahan PDRB, sehingga dapat dikatakan bahwa aktivitas produksi belum berjalan optimal. Peningkatan PDRB diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga dapat mengatasi masalah kemiskinan.

Salah satu faktor penting dalam meningkatkan PDRB ialah investasi. Investasi merupakan pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2001 dalam Mashudi, Taufiq & Priana 2017). Sementara itu, PDRB yang dialokasikan untuk berinvestasi akan mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan daya saing (Anas, 2019), sehingga investasi diharapkan dapat meningkatkan produksi barang dan jasa sehingga mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Grafik 1-2
Nilai Investasi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2019



Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Provinsi Jawa Tengah, data diolah

Berdasarkan Grafik 1-2, jumlah dan pertumbuhan investasi pada tahun 2010 hingga 2019 cenderung mengalami fluktuasi. Investasi yang berfluktuasi dapat menyebabkan tidak stabilnya kegiatan ekonomi, dan hal tersebut dapat juga berdampak pada PDRB. Diharapkan pemerintah dapat menjaga konsistensi investasi, sehingga perekonomian berjalan lancar, pendapatan nasional dan daerah meningkat, dan kesejahteraan masyarakat terjamin.

Selain oleh investasi, PDRB juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia suatu wilayah yang dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini disebabkan karena IPM mencakup tiga indeks kehidupan, yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Pengeluaran. Dengan demikian, semakin tinggi IPM suatu wilayah, secara teori, kualitas penduduk dan produktivitas kerja wilayah tersebut semakin tinggi, dan hal tersebut dapat berujung pada tingginya pendapatan (Todaro & Smith, 2011). Menurut

Soebagiyo, Hasmarini, & Chuzaimah (2005) pendayagunaan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menghasilkan barang jasa dipengaruhi oleh jumlah kualitas SDM tersebut dan kondisi yang mempengaruhi pengembangan perekonomian.

Tabel 1-2
IPM di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2019

Tahun	IPM
2010	66,08
2011	66,64
2012	67,21
2013	68,02
2014	68,78
2015	69,49
2016	69,98
2017	70,52
2018	71,12
2019	71,73

Sumber: BPS Jawa Tengah

Berdasarkan Tabel 1-2, nampak bahwa IPM di Jawa Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga 2019. Meski demikian, rata-rata IPM di Provinsi Jawa Tengah masih termasuk kategori sedang menurut BPS (60 hingga 70). Hal tersebut mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Tengah masih dalam taraf menengah. Peningkatan IPM diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kerja seseorang yang berdampak pada naiknya pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Kemiskinan ialah salah satu indikator penting untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan yang tinggi dapat mencerminkan

rendahnya kesejahteraan masyarakat karena konsumsi mereka tergolong rendah, sehingga mereka tidak memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut disebabkan karena pendapatan yang diperoleh masyarakat termasuk rendah, sehingga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, kemiskinan merupakan masalah yang sangat penting. Pada tahun 2012-2019, persentase penduduk miskin cenderung mengalami penurunan. Meski demikian, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah masih termasuk banyak. Hal ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah, sehingga kemiskinan diturunkan.

Karena kemiskinan didekati dari sisi pengeluaran, dan karena pengeluaran masyarakat tergantung dari pendapatan mereka, maka kemiskinan juga dipengaruhi oleh pendapatan. Pendapatan suatu wilayah dapat diukur melalui data PDRB. PDRB sendiri dipengaruhi oleh investasi dan kualitas sumber daya manusia (IPM). Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh investasi dan IPM terhadap PDRB, kemudian pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2019.

C. Tujuan dan Manfaat Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini ialah untuk mengestimasi pengaruh investasi dan IPM terhadap PDRB, dan pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2019 dengan menggunakan regresi data panel dan pendekatan kaidah rantai (*chain rule*) pada diferensial.

Manfaat penelitian ini ialah mampu memberikan informasi dan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dalam pengambilan strategi dan kebijakan terkait masalah kemiskinan. Sedangkan bagi para akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan referensi mengenai kemiskinan.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disajikan dalam lima bab yang berurutan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teori Keynes tentang permasalahan yang akan diteliti dan penelitian terdahulu yang melandasi penelitian ini. Di akhir bab ini akan dirumuskan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjabarkan model dan teknik analisis data, Uji Chow dan Uji Hausman, serta uji kebaikan model dan hipotesis. Lalu, bab ini juga akan menjabarkan definisi operasional variabel penelitian serta jenis, sumber, dan metode pengumpulan data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil regresi, interpretasi hasil regresi, serta interpretasi ekonomi.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian.